



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Tahun Sidang     | : 2020-2021   |
| Masa Persidangan | : I   |
| Rapat Ke-        | : 20  |
| Jenis Rapat      | : Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat   |
| Sifat Rapat      | : Terbuka   |
| Hari/Tanggal     | : Rabu, 23 September 2020   |
| Waktu            | : Pukul 11.00 WIB s.d Selesai   |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KKIII)<br>Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta  |
| Acara            | : 1. Penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan<br>Banggar; dan<br>2. Pengambilan Keputusan.   |
| Ketua Rapat      | : <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II<br/>DPR RI</b>   |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI  |
| Hadir            | : A. 32 (tiga puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI<br>dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II<br>DPR RI<br>B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan<br>Reformasi Birokrasi<br>C. Kepala Badan Kepegawaian Negara<br>D. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara |

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Banggar dan pengambilan keputusan, hari Rabu, 23 September 2020, dibuka pukul 11.10 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan agenda membahas penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Banggar dan pengambilan keputusan, yaitu:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2021 sebesar **Rp277.712.190.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)**, sudah termasuk pagu anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN sebesar **Rp44.688.905.000,- (empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian PANRB Tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen : Rp168.922.081.000,-
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN : Rp108.790.109.000,-
2. Menteri PANRB menyampaikan usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PANRB sebesar **Rp96.802.148.000,- (sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)** termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar **Rp31.697.302.000 (tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah)**, dan menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian PANRB tahun 2021 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021 sebesar **Rp634.105.873.000,- (enam ratus tiga puluh empat milyar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BKN Tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen : Rp 555.170.649.000,-
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN : Rp 78.935.224.000,-

### III. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tahun 2021 sebesar **Rp277.712.190.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus dua belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)**, sudah termasuk pagu anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN sebesar **Rp44.688.905.000,- (empat puluh empat milyar enam ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian PANRB Tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen : Rp168.922.081.000,-
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN : Rp108.790.109.000,-
  
2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian PANRB sebesar **Rp96.802.148.000,- (sembilan puluh enam milyar delapan ratus dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)** termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran KASN sebesar **Rp31.697.302.000 (tiga puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah)**, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian PANRB tahun 2021 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI.
  
3. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2021 sebesar **Rp634.105.873.000,- (enam ratus tiga puluh empat milyar seratus lima juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)**, untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BKN Tahun 2021, dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut:
  - a. Program Dukungan Manajemen : Rp 555.170.649.000,-
  - b. Program Kebijakan, Pembinaan, Profesi, dan Tata Kelola ASN : Rp 78.935.224.000,-

### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.15 WIB.

Jakarta, 23 September 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270